BPKAD
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II

TAHUN 2026

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan 30127
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

Palembang, 9 Juli 2026

Nomor : 700.1.1 / 3768 /BPKAD-I/2026
Sifat : Penting
Hal : Undangan

Yth. 1. Pejabat Administrator di Lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pejabat Pengawas di Lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
di
Tempat

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, maka kami meminta Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal	:	Senin, 13 Juli 2026
Pukul	:	9.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Utama BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Acara	:	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Triwulan II TA 2026.

Diharapkan masing-masing bidang membawa Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah,

H. Yossi Hervandi, SE.,M.M.,CGAA
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 198208162001121004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan 30127
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

NOTULEN

Rapat	:	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun Anggaran 2026
Hari/Tanggal	:	Senin, 13 Juli 2026
Waktu	:	9.00 WIB s.d selesai
Pimpinan Rapat	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Peserta	:	Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Para Kepala Sub bidang di lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Rapat dibuka oleh Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan pengarahan terhadap capaian realisasi masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan Sekretariat maupun Bidang-bidang sampai dengan 30 Juni 2026, serta masalah dan kendala yang dihadapi Sekretariat dan Bidang-bidang dipaparkan sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2026 total anggaran setelah Pergeseran sebesar Rp 3,364,662,969,272.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 714,069,642,570.98 atau 21.22 % .

Anggaran yang dilaksanakan Sekretariat setelah Pergeseran sebesar Rp 98,115,636,736.00 dengan total realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebesar Rp 16,527,370,454.00 atau 16.84 %, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 933,972,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 283,924,480.00 atau 30.40 %;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 63,303,964,404.00 dengan realisasi sebesar Rp 10,817,126,370.00 atau 17.09 %;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 140,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 132,483,887.00 atau 94.63 %;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 405,101,158.00 dengan realisasi sebesar Rp 68,448,550.00 atau 16.90 % ;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp 6,947,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 1,967,441,760.00 atau 28.32 %;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp 13,500,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0 %;
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp 4,367,079,174.00 dengan realisasi sebesar 1,129,750,326.00.00 atau 25.87 %;

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 5,115,520,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 1,268,007,645.00 atau 24.79 %;
9. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dianggarkan sebesar Rp 3,403,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 860,187,436.00 atau 25.28 %.

- Faktor Penghambat : tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan , kegiatan yang belum terealisasi pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Triwulan III.
- Solusi yang akan dilaksanakan : Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dan dalam pencapaian target berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Laporan Progres Terlampir).

B. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyampaikan bahwa total anggaran setelah Pergeseran pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah sebesar Rp 3,263,628,332,536.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 696,820,381,303.98 atau 21.35 % dengan rincian Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dianggarkan sebesar Rp 2,017,648,668.00 terealisasi sebesar Rp 350,181,807.00 atau 17.35 % dengan rincian Sub Kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dianggarkan sebesar Rp 522,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 93,373,317.00 atau 17.89 %;
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dianggarkan sebesar Rp 1,495,648,668.00 dengan realisasi sebesar Rp 256,808,490.00 atau 17.17 %.
2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp 850,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 136,425,083.00 atau 16.05%.
3. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp 3,248,779,683,868.00 dengan realisasi sebesar Rp 696,188,794,072.98 atau 21.42 % dengan rincian Sub Kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp 1,716,970,429,335.00 dengan realisasi sebesar Rp 322,702,018,225.98 atau 18.79 %;
   b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi dianggarkan sebesar Rp 1,531,809,254,533.00 dengan realisasi sebesar Rp 373,486,775,847.00 atau 24.38 %.

- Faktor Penghambat : Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, penyusunan Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD.
- Solusi yang akan dilaksanakan : Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat internal yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

  (Laporan Progres Terlampir).

C. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah menyampaikan bahwa total anggaran setelah Pergeseran pada Bidang Perbendaharaan Daerah sebesar Rp 11,200,000,000.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 11,295,940.00 atau 0.10 % dengan rincian Kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dianggarkan sebesar Rp 770,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 11,295,940.00 atau 1.47 % dengan rincian Sub Kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp 420,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 5,184,100.00 atau 1.23 %
   b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dianggarkan sebesar Rp 350,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 6,111,840.00 atau 1.75 %.
2. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dianggarkan sebesar Rp 10,000,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0.00 %;
3. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dianggarkan sebesar Rp 430,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 0.00 atau 0.00 %.

- Faktor Penghambat : Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target, Realisasi atas Pemotongan SP2D atas Kas Triwulan II Tahun 2026 masih berjalan sesuai dengan rencana.
- Solusi yang akan dilaksanakan : Percepatan Proses Realisasi Anggaran. Mempercepat penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) agar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dapat segera melakukan pencairan anggaran di Triwulan III, sehingga mencegah menumpuknya SiLPA di akhir tahun.

(Laporan Progres Terlampir).

D. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa total anggaran setelah Pergeseran Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar Rp 1,211,000,000.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 133,684,401.00 atau 11.03 % dengan rincian Kegiatan :

1. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp 356,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 3,565,101.00 atau 1.00 %;
2. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp 855,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 130,119,300.00 atau 15.22 % dengan rincian Sub Kegiatan :
   a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dianggarkan sebesar Rp 390,000,000.00.00 dengan realisasi sebesar Rp 52,958,450.00 atau 13.58 %;
   b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dianggarkan sebesar Rp 465,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 77,160,850.00 atau 16.59 %.

- Faktor Penghambat : Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target (penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan batas waktu dan peraturan yang telah ditetapkan.
- Solusi yang akan dilaksanakan : mekanisme dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan Update regulasi terbaru terkait pengelolaan keuangan.

(Laporan Progres Terlampir).

E. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyampaikan bahwa total anggaran setelah Pergeseran Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp 2,489,000,000.00 dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 721,890,813.00 atau 29.00 % , dengan rincian Sub Kegiatan :

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp 485,000,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 313,399,730.00 atau 64.62 %;
2. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp 1,250,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 328,631,381.00 atau 26.28 %;
3. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp 753,500,000.00 dengan realisasi sebesar Rp 79,859,702.00 atau 10.60%;

- Faktor Penghambat :
  a. Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target.
  b. Inventarisasi BMD yang belum dilaksanakan, dikarenakan Aplikasi SIPD E BMD yang mengalami kendala
  c. belum terbentuknya Tim Pengawasan BMD yang telah dilakukan kontrak perikatan pemanfaatan
  d. proses penertiban memerlukan kerja Tim dan proses litigasi memerlukan waktu yang cukup lama.

- Solusi yang akan dilaksanakan :
  a. meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mekanisme dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
  b. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait Aplikasi SIPD E BMD.
  c. Percepatan Langkah Strategis Pembentukan Tim Pengawasan BMD
  d. Optimalisasi Kerja samaTim dan proses litigasi.

(Laporan Progres Terlampir).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

H. Yossi Hervandi, SE.,MM., CGAA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198208162001121004

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Sumatera Selatan 30127,
Telp.(0711) 7443621, Fax. (0711) 7443621 Palembang 30127
Laman bpkad.sumselprov.go.id, Pos-el bpkad@sumselprov.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

NO	Nama	Jabatan	L/P	Tanda Tangan	
1.	H. Jossi Hervandi, SE, MM. CGAA	KABAN	L		
2.	YUNE ROSALAINI	KABID AKT	P		
3	Feti Astuti.	Kasi Ags	P		
4	Lanri Stiz A	Ksb. PDI	L		
5	Rommy	Ksb Kuaya			
6	Muhammad R Ridho	Kjb. Perben II	L		
7	ANDRI	Ksb Perben III	L		
8	Arlini	Ksb perben I	P		
9	Zulidah	Ksb. ART II	P		
10	Riyatno	Ksb aset III	L		
11	Silvana Yovanni	Ksb. AKT. I	P		
13	Febi Muharomi	Ksb Ang 1	L		
14	Suprianthony	Kasub. Ang. 3.			
15	Ady. L	Kasi. Pampen	L		
16.	Alfadlun	Staf	L		
17	Fenri Yanuar	Sekretaris	L		
18	Alen Agustin	Irasub. Peratausahaan	P		

DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI RENAKSI TRIWULAN II TAHUN 2026
SENIN, 13 JULI 2026







LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN II

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

URUSAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Anggaran pada Triwulan					Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	I	II	Target Anggaran Induk	Target Anggaran Pergeseran	I	II	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11			12
I	**Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah**	**Nilai Sakip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**	**91**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**1**	**17,88**	**28,08**	**127,641,223,754.00**	**94,712,636,736.00**	**7,133,348,562.00**	**7,175,554,815.00**	**15,667,183,018.00**	**16.54**
i					***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan***	100%	*36.36*	*13,64*	***903,972,000.00***	***933,972,000.00***	***101,054,950.00***	***182,869,530.00***	***283,924,480.00***	***30.40***
1						**Laporan (Peta Resiko**, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, **PK, LKJiP**, Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP, Buku RKA, Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada, **Buku DPA**, Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, **Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD), Laporan Perjanjian Kinerja, Laporan Renaksi**	**22**	**8**	**3**	903,972,000.00	933,972,000.00	101,054,950.00	182,869,530.00	283,924,480.00	30.40
ii					***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan***	100%		*57,92*	***64,039,604,404.00***	***63,303,964,404.00***	***5,069,836,162.00***	***5,104,584,270.00***	***10,817,126,370.00***	***17.09***
2					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Orang/ bulan**	**172**	**83 ASN dan 72 P3K**		62,457,124,404.00	61,657,124,404.00	4,884,437,712.00	5,104,584,270.00	9,989,021,982.00	16.20
3					Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Dokumen** (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	**60**	**15**	**15**	1,332,480,000.00	1,276,840,000.00	155,531,450.00	460,553,050.00	616,084,500.00	48.25
4					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan** (Laporan Keuangan Audit dan Audited, LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD, Rekon Akuntansi/Semester, Dokumen Kartu Kendali/semester, RKBMD, **Laporan Rekon Per Triwulan,** Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	27	1	8	250,000,000.00	370,000,000.00	29,867,000.00	182,152,888.00	212,019,888.00	57.30
iii					***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi***	***100***		***100***	***270,000,000.00***	***140,000,000.00***	***0.00***	***132,483,887.00***	***132,483,887.00***	***94.63***
5					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**Dokumen** (Dokumen Pengamanan BMD)	1	0	1.00	270,000,000.00	140,000,000.00	0.00	132,483,887.00	132,483,887.00	94.63

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Anggaran pada Triwulan					Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	I	II	Target Anggaran Induk	Target Anggaran Pergeseran	I	II	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11			12
iv					***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan***	100%		***26,43***	***350,000,000.00***	***405,101,158.00***	***0.00***	***59,723,550.00***	***68,448,550.00***	***16.90***
6					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Dokumen** (SKP perbulan dan SKP Tahunan, Anjab, ABK, Evjab, Penataan Arsip Dinamis)	28	6	6	250,000,000.00	305,101,158.00	0.00	59,723,550.00	59,723,550.00	19.57
7					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**Orang**	10	0	2	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	8,725,000.00	8,725,000.00	8.73
v					***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik***	100%		***44,21***	***5,412,000,000.00***	***6,947,000,000.00***	***1,194,507,057.00***	***66,086,000.00***	***1,967,441,760.00***	***28.32***
8					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Paket** (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas)	4	0	1	500,000,000.00	500,000,000.00	164,595,000.00	66,086,000.00	230,681,000.00	46.14
9					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Paket** (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Projektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	1	0	0	1,010,000,000.00	1,260,000,000.00	60,094,000.00	9,624,500.00	69,718,500.00	5.53
10					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Paket**	1	0	0	1,746,000,000.00	2,196,000,000.00	544,535,696.00	275,427,954.00	819,963,650.00	37.34
11					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Paket**	1	0	0	832,000,000.00	832,000,000.00	193,215,340.00	220,125,850.00	413,341,190.00	49.68
12					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Dokumen**	1	0	0	40,000,000.00	150,000,000.00	7,742,000.00	7,551,000.00	15,293,000.00	10.20
13					Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Laporan** (1 Laporan per Bulan)	**12**	**3**	**3**	184,000,000.00	484,000,000.00	164,996,800.00	12,372,000.00	177,368,800.00	36.65
14					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Laporan** (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	**400**	**67**	**137**	800,000,000.00	800,000,000.00	59,328,221.00	156,827,399.00	216,155,620.00	27.02
15					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Dokumen** (Aplikasi : IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Lapor SP4N)	8	0	**2**	300,000,000.00	725,000,000.00	0.00	24,920,000.00	24,920,000.00	3.44
vi					***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan***	100%		**0**	***39,007,048,176.00***	***13,500,000,000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/ Unit	1	0		39,007,048,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1	0		0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	38	0	0	0.00	13,300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
vii					***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah***	100%		***47,22***	***4,579,079,174.00***	***4,367,079,174.00***	***343,099,788.00***	***786,650,538.00***	**1,129,750,326.00**	***25.87***
18					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Laporan** (1 Laporan per Bulan)	12	3	3	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	10.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Anggaran pada Triwulan					Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	I	II	Target Anggaran Induk	Target Anggaran Pergeseran	I	II	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11			12
19					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**Laporan** (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	36	9	9	1,344,959,174.00	1,344,959,174.00	179,448,388.00	229,578,538.00	*409,026,926.00*	30.41
20					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	2	3	3,214,120,000.00	3,002,120,000.00	163,651,400.00	555,072,000.00	718,723,400.00	23.94
viii					***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan***	**100%**		***41,92***	***13,079,520,000.00***	***5,115,520,000.00***	***424,850,605.00***	***843,157,040.00***	**1,268,007,645.00**	***24.79***
21					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Unit** (5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1)	6	2	0	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00	170,028,805.00	27,864,700.00	197,893,505.00	14.34
22					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**Unit** (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	40	8	10	288,000,000.00	658,000,000.00	95,841,800.00	150,195,400.00	246,037,200.00	37.39
23					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	2	3	561,520,000.00	1,541,520,000.00	59,310,000.00	367,421,000.00	426,731,000.00	27.68
24					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Unit** (Unit Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	4	0	1	10,850,000,000.00	1,536,000,000.00	99,670,000.00	297,675,940.00	397,345,940.00	25.87
II	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan.**	**1**			**WTP (Opini BPK atas Laporan Keuangan)**									
		Penetapan Dokumen APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026	**1.00**			*Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2026 Paling Lambat Minggu Pertama bulan Oktober 2026*									
		Penetapan Dokumen APBD Induk Tahun Anggaran 2027	**1.00**			*Penetapan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.*									
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	5%			*Deviasi Realisasi Belanja diperoleh setelah berakhirnya Tahun Anggaran. LRA Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp735.307.020.145,00 atau 7,74% dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp9.497.450.270.236,00*									
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	***Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan***	***100%***		***27,59***	***3,305,340,683,868.00***	***3,267,031,332,536.00***	***24,145,495,813.00***	***673,535,072,926.98***	***697,680,568,739.98***	***21.36***
			25.95%	26,14%	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%									

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Anggaran pada Triwulan					Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	I	II	Target Anggaran Induk	Target Anggaran Pergeseran	I	II	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11			12
			36.60%	27,52%	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%									
			2.50%	-	Persentase Penurunan SILPA	%									
			100%	-	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%									
i					***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	***Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending***	***100***		***24,04***	***4,070,000,000.00***	***5,420,648,668.00***	***186,995,309.00***	***1,023,373,934.00***	***1,210,369,243.00***	***22.33***
25					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	**Dokumen** (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	4	0	0	372,000,000.00	522,000,000.00	24,537,809.00	68,835,508.00	93,373,317.00	17.89
26					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	**Dokumen** (Raperda, Perda, Rapergub ,Pergub,'Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026	34	8	0	895,000,000.00	1,495,648,668.00	24,357,000.00	232,451,490.00	256,808,490.00	17.17
27					Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	**Dokumen**	1	0	0	2,803,000,000.00	3,403,000,000.00	138,100,500.00	722,086,936.00	860,187,436.00	25.28
ii					***Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya***	***100***		***14,00***	***1,036,000,000.00***	***1,206,000,000.00***	***22,596,964.00***	***117,393,220.00***	***139,990,184.00***	***11.61***
28					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	**Laporan**	34	0	0	700,000,000.00	850,000,000.00	22,596,964.00	113,828,119.00	136,425,083.00	16.05
29					Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	**Laporan** (SK Evaluasi Kab/Kota dan Laporan TPTGR)	18	0	0	336,000,000.00	356,000,000.00	0.00	3,565,101.00	3,565,101.00	1.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Anggaran pada Triwulan					Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	I	II	Target Anggaran Induk	Target Anggaran Pergeseran	I	II	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11			12
iii					***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***	***Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi***	***100***	***1.50***	***12,5***	***670,000,000.00***	***770,000,000.00***	***0.00***	***11,295,940.00***	***11,295,940.00***	***1.47***
30					Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	**Dokumen** (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID,TDF)	44	3	15	370,000,000.00	420,000,000.00	0.00	5,184,100.00	5,184,100.00	1.23
31					Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	**Dokumen** (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	179	0	90	300,000,000.00	350,000,000.00	0.00	6,111,840.00	6,111,840.00	1.75
iv					***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***	***Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD***	***100***		***58,93***	***785,000,000.00***	***855,000,000.00***	***0.00***	***130,119,300.00***	***130,119,300.00***	***15.22***
32					Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	**Dokumen** (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D)	17	0	4	350,000,000.00	390,000,000.00	0.00	52,958,450.00	*52,958,450.00*	13.58
33					Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan)	14	0	13	435,000,000.00	465,000,000.00	0.00	77,160,850.00	77,160,850.00	16.59
v					***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	***Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah***	***100***	***0.67***	***26,29***	***3,298,779,683,868.00***	***3,258,779,683,868.00***	***23,935,903,540.00***	***672,252,890,532.98***	***696,188,794,072.98***	***21.36***
34					Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	**Laporan** (17 Kab mak 2 Tahap)	34	1	18	1,716,970,429,335.00	1,716,970,429,335.00	15,000,000,000.00	307,702,018,225.98	322,702,018,225.98	18.79
35					Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	**Laporan** (Laporan Pencairan)	4	0	0	50,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36					Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	**Laporan** (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	18	1	2	1,531,809,254,533.00	1,531,809,254,533.00	8,935,903,540.00	364,550,872,307.00	373,486,775,847.00	24.38

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2026		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Realisasi Kinerja pada Triwulan			Realisasi Anggaran pada Triwulan					Capaian (%)
			Target	Realisasi			Target	I	II	Target Anggaran Induk	Target Anggaran Pergeseran	I	II	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11			12
III	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Indeks Pengelolaan Aset**	**2,18**		**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100**	**10,00**	**55,23**	**2,459,000,000.00**	**2,919,000,000.00**	**127,356,380.00**	**594,534,433.00**	**721,890,813.00**	**24.73**
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	6%			%			3						
		Asset Management	100%			%			100						
I					***Pengelolaan Barang Milik Daerah***	***Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel***	***100***	***10,00***	***55,23***	***2,459,000,000.00***	***2,919,000,000.00***	***127,356,380.00***	***594,534,433.00***	***721,890,813.00***	***24.73***
37					Penyusunan Standar Harga	**Dokumen** (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	4	1	0	330,000,000.00	430,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38					Penatausahaan Barang Milik Daerah	**Laporan** (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset, Laporan Rutin dan Laporan BOS, Laporan Barang Milik Daerah Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan	61	15	25	400,000,000.00	485,000,000.00	19,687,450.00	293,712,280.00	313,399,730.00	64.62
39					Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Laporan** (Laporan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel dan laporan Pengawasan pengendalian pengelolaan BMD, laporan upaya penertiban BMD bermasalah, RKBMD dan 1 Rekap Gabungan)	76	4	52	1,025,500,000.00	1,250,500,000.00	79,423,350.00	249,208,031.00	328,631,381.00	26.28
40					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	**Dokumen** (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtangan BMD, Pinjam Pakai BMD, permohonan OPD atau Mitra terhadap penilaian BMD)	60	20	23	703,500,000.00	753,500,000.00	28,245,580.00	51,614,122.00	79,859,702.00	10.60
Jumlah : 40 sub kegiatan										**3,435,440,907,622.00**	**3,364,662,969,272.00**	**31,406,200,755.00**	**681,305,162,174.98**	**714,069,642,570.98**	**21.22**

Palembang, 15 Juli 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA.
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 198208162001121004